



Katalog: 4102002.3375

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN Tahun 2014**



Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

<https://pekalongankota.bps.go.id>



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
KOTA PEKALONGAN Tahun 2014**

<https://pekalongankota.go.id>

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2014**

No. Katalog : 1407.3375  
ISSN : -  
No. Publikasi : 33755.1210  
Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : 42  
Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan  
Analisis Statistik BPS Kota Pekalongan  
Gambar Kulit : Seksi Integrasi Pengolahan dan  
Diseminasi Statistik BPS Kota Pekalongan  
Diterbitkan oleh : BPS Kota Pekalongan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia*



## **SAMBUTAN**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan memberikan gambaran hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Pelaksanaan pembangunan pada era sekarang akan menyangkut semua aspek antara lain ekonomi, sosial dan komunikasi. Informasi yang berpengaruh terhadap pola pembangunan daerah berupa interaksi pembangunan, dalam pelaksanaannya akan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi.

Informasi/data yang komprehensif dan dapat dipercaya sangat diperlukan supaya perencanaan pembangunan tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat mutu dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu saya menyambut gembira dengan terbitnya buku IPM Kota Pekalongan Tahun 2014 atas kerja sama antara Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekalongan.

Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas segala upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan sebagai penyaji data, dan semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, November 2015

**WALIKOTA PEKALONGAN**

**dr. H.M. BASYIR AHMAD**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya hingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan Tahun 2014 dapat terwujud.

Publikasi ini berisi gambaran tentang tingkat kemajuan pembangunan manusia yang telah dicapai oleh Kota Pekalongan selama periode 2010 – 2014 beserta komponen-komponennya yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, serta hal lainnya yang terkait.

Dengan diterbitkannya IPM ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengambil kebijakan pembangunan khususnya pembangunan manusia pada masa yang akan datang.

Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan pada penyusunan mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pekalongan, November 2015  
BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PEKALONGAN  
KEPALA,

Eddy Prawoto

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I      PENDAHULUAN	
Latar Belakang .....	1
BAB II     METODOLOGI	
II.1 Konsep dan Definisi .....	3
II.2 Indikator dan Variabel .....	4
II.3 Sumber Data .....	5
II.4 Metode Penghitungan IPM .....	5
BAB III    GAMBARAN UMUM WILAYAH	
III.1 Kondisi Geografis .....	16
III.2 Kependudukan .....	16
BAB IV     ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA	
IV.1 Indikator Pendidikan .....	18
IV.2 Indikator Kesehatan .....	26
IV.3 Indikator Standar Hidup Layak .....	30
BAB V      PENUTUP	
Kesimpulan .....	34
DAFTAR LAMPIRAN .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai adanya perubahan atau perkembangan dari satu periode ke periode berikutnya. Pada pembangunan manusia, maka hal tersebut masih relevan jika diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada manusia, baik dilihat dari sisi ekonomi maupun sosial. Perubahan atau perkembangan manusia dari sisi ekonomi dan sosial ini, dapat dijadikan sebagai indikator. Selain hal tersebut, pembangunan manusia bisa juga mencakup dimensi yang sangat luas, yang banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Untuk itu, perlu telah dilakukan dengan untuk membuat suatu alat pengukuran yang dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang presentase pencapaian terhadap sasaran ideal.

Upaya pembuatan alat ukur tersebut, adalah dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Variabel-variabel sosial dan ekonomi disusun menjadi indeks komposit, sehingga dapat diperbandingkan satu dengan lainnya, atau antara satu periode dengan periode sebelumnya. Salah satu indeks komposit yang akan digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

IPM atau HDI mulai diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan terus dikembangkan di tahun 2014 sebagai alat untuk mengetahui indikator kesejahteraan manusia. Ada tiga dimensi yang akan digunakan untuk melihat kemajuan manusia yaitu berdasarkan dimensi kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi pengetahuan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp).

IPM yang diukur (dengan ukuran angka-angka tertentu) menurut wilayah (kabupaten/kota) selama beberapa tahun, akan bermanfaat menjadi informasi atau masukan kepada pembuat keputusan dalam mencapai pembangunan manusia yang seutuhnya berdasarkan pada aspek keseimbangan, pemerataan, produktivitas dan pemberdayaan.

IPM yang merupakan salah satu alat ukur tersebut, diharapkan dapat menjadi alat untuk merangkum beberapa dimensi utama pembangunan manusia, yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Beberapa dimensi utama itu adalah kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak.

Dengan paradigma baru ini, pembangunan tidak lagi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi sudah bergeser kearah pembangunan manusia secara utuh melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Empat komponen kunci dari paradigma pembangunan manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) yaitu:

1. Produktivitas (*productivity*), yaitu penduduk harus mampu meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja.
2. Pemerataan (*Equity*), yaitu setiap penduduk harus mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial.
3. Kestinambungan (*Sustainability*), yaitu akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang saja, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik, manusia, alam harus dapat diperbarui.
4. Pemberdayaan (*Empowerment*), yaitu penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk) kehidupan mereka, serta berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

## BAB. II

### METODOLOGI

#### II.1 Konsep dan Definisi

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, adalah suatu indikator komposit tunggal yang dirangkum dari beberapa dimensi utama pembangunan manusia (dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi) yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

**Ratio jenis kelamin (Sex Ratio)**, adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan Perempuan dikalikan 100.

**Angka ketergantungan (Dependency Ratio)**, adalah perbandingan antara penduduk usia 0-14 tahun dan usia diatas 65 tahun terhadap penduduk usia produktif (15-65 tahun).

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**, didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

**Harapan Lama Sekolah (HLS)**, didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

**Angka Partisipasi Murni (APM) SD**, adalah proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah tingkat Sekolah Dasar (SD).

**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP**, adalah proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

**Angka Partisipasi Murni (APM) SMU**, adalah proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU).

**Jumlah penduduk usia sekolah**, adalah banyaknya penduduk yang berusia 7 sampai 15 tahun.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**, merupakan perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun atau lebih.

*Angka Pengangguran Terbuka*, adalah perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja .

*Persentase Pekerja yang setengah menganggur*, adalah proporsi penduduk usia 15 tahun atau lebih yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

*Angka Harapan Hidup Waktu Lahir*, merupakan hasil perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.

*Angka Kesakitan Sesaat (Point Prevalency)*, adalah proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

*Penduduk per Puskesmas*, adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas.

## **II.2 Indikator dan Variabel**

Indikator dan variabel yang dipakai dalam IPM adalah variabel-variabel yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa dimensi utama, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan sebagai berikut :

- ***Indikator Kesehatan:***

Variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) (tahun).

- ***Indikator Pengetahuan:***

Variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun).

- ***Indikator Standar Hidup Layak:***

Variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)

### II.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan IPM ini adalah data olahan yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014.

### II.4 Metode Penghitungan IPM

IPM disusun dari tiga komponen yaitu: komponen kesehatan, diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir; komponen pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan komponen standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan *Purchasing Power Parity* (PPP rupiah). Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat, dan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pencapaian dua hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan produktivitas, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak.

#### a. Komponen Kesehatan

Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth/e<sub>0</sub>*). Angka  $e_0$  untuk tingkat propinsi yang disajikan pada tulisan ini, merupakan hasil penghitungan tidak langsung (*indirect technique*) dengan menggunakan paket program Mortpack berdasarkan data rata-rata jumlah anak lahir hidup dan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur ibu 15-49 tahun, dan dengan memperhatikan trend data hasil Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas).

#### b. Komponen Pengetahuan

Komponen pengetahuan diukur dari dua indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah (*EYS/Expected Years of Schooling*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata lamanya

sekolah (*MYS/Mean Year of Schooling*), didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

### c. **Komponen Standar Hidup Layak (*Purchasing Power Parity/PPP*)**

Standar hidup layak merupakan komponen ketiga selain dua komponen diatas yang juga diakui secara luas sebagai unsur dasar pembangunan manusia. Berbeda dengan UNDP yang menggunakan GDP ril per kapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak, BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita ril yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya, sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Untuk mempermudah penafsiran, indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100).

Berdasarkan nilai IPM yang diperoleh untuk masing-masing daerah/wilayah maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut, diantaranya yaitu tingkat status pembangunan manusia dan tingkat pertumbuhan IPM.

Komponen IPM adalah tingkat usia hidup manusia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Dalam pembangunan manusia, yang pertama dilakukan adalah mengusahakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” (*longevity*) yang panjang dan sehat. Usia hidup menurut UNDP diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*Life Expectancy at Birth*) yang dinotasikan dengan  $e_0$ .  $e_0$  ini dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode brass, varian trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen kedua dalam pembangunan manusia adalah komponen pengetahuan (*knowledge*). Komponen itu diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas KOR. Indikator angka harapan lama sekolah diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara

simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan .

Komponen ketiga dalam pembangunan manusia adalah komponen standar hidup layak, yang diukur dengan indikator rata-rata konsumsi ril yang telah disesuaikan. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur komponen ini, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional, UNDP menggunakan indikator PDB perkapita ril yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per Capita*) sebagai ukuran komponen tersebut.

Kemudian untuk keperluan IPM Kabupaten/Kota, data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak, karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur daya beli penduduk. Sebagai pengganti ukuran tersebut, digunakan ukuran konsumsi perkapita ril yang telah disesuaikan. Sumber data yang telah digunakan adalah *raw data* Susenas Modul Konsumsi.

Adapun tahapan perhitungan indikator konsumsi ril per kapita yang telah disesuaikan sebagai berikut :

- Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (= **A**)
- Mendeflasikan nilai A dengan IHK provinsi yang sesuai (= **B**)
- Menghitung daya beli per unit (= **PPP/unit**). Metode perhitungan sama seperti metode yang digunakan Internasional Comparision Project (**ICP**) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul Konsumsi.
- Membagi nilai B dengan PPP/ unit (= **C**)
- Menyesuaikan nilai C dengan formula *Atkinson* sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari C
- Perhitungan PPP/ unit dilakukan dengan rumus :

$$PPP / Unit = \frac{\sum_i E(i, j)}{\sum P(i, j)Q(i, j)}$$

*keterangan :*

**E(ij)** : Pengeluaran untuk komoditi j

**P(ij)** : Harga komoditi j

**Q(ij)** : Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} C_{(i)}^* &= C_{(i)} && \text{, jika } C_{(i)} \leq Z \\ &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} && \text{, jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\ &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z) && \text{, jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\ &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(Z) + 4(C_{(i)} - 3Z)^{1/4} && \text{, jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z \end{aligned}$$

*keterangan :*

$C_{(i)}$  : Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

$Z$  : *Thres hold* atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang ditetapkan secara arbiter Rp 547.500,- per kapita setahun atau Rp. 1.500 per kapita perhari.

Indeks komponen IPM, merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimumnya dan nilai minimum indikator tersebut. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i) \min}] / [X_{(i) \max} - X_{(i) \min}]$$

*keterangan :*

$X_{(i)}$  : indikator ke-i (i=1,2,3,..)

$X_{(i) \max}$  : Nilai Maksimum  $X_{(i)}$

$X_{(i) \min}$  : Nilai Minimum  $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan minimum indikator  $X_{(i)}$  disajikan pada Tabel 1.

**Tabel : 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum  
Komponen IPM**

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

Keterangan:

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

\*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

### ***Rumus perhitungan IPM***

Rumus perhitungan IPM disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

*keterangan :*

**X<sub>(1)</sub>** : Indeks Kesehatan

**X<sub>(2)</sub>** : Indeks Pengetahuan/Pendidikan

**X<sub>(3)</sub>** : Indeks Standar Hidup Layak

Hasil perhitungan IPM memberikan gambaran seberapa jauh suatu wilayah telah mencapai sasaran yang disentuh, yaitu angka harapan hidup 85 tahun. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tingkat pengeluaran konsumsi yang telah mencapai standart hidup layak. Semakin dekat IPM suatu wilayah terhadap angka 100 maka semakin dekat dengan sasaran yang dicapai.

Dalam memahami makna nilai PBB melalui UNDP (*United Nation Depeloment Programme*) memberikan kualitas tingkat status yakni:

**Tabel : 2.2. Besaran Nilai IPM dan Statusnya**

<b>Tingkat Status</b>	<b>Kriteria</b>
(1)	(2)
<b>Rendah</b>	<b>IPM &lt; 60</b>
<b>Sedang</b>	<b>60 ≤ IPM &lt; 70</b>
<b>Tinggi</b>	<b>70 ≤ IPM &lt; 80</b>
<b>Sangat Tinggi</b>	<b>IPM ≥ 80</b>

### **Perhitungan Kecepatan Perkembangan IPM**

Dalam menghitung kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Secara sederhana, hal ini untuk menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Pertumbuhan IPM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1})}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100$$

yaitu :

$IPM_t =$  IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{t-1} =$  IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Kemudian dalam menghitung masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

**a) Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )**

Menurut UNDP usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*Life Expectancy at Birth*). yang biasa dinotasikan dengan  $e_0$  Karena di Indonesia tidak memiliki sistem registrasi langsung, maka digunakan metode ini dengan memakai dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup/ALH (*live births*) dan rata-rata anak yang masih hidup/AMH (*still living*) Per wanita 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan perhitungan  $e_0$  dilakukan dengan menggunakan *software mortpack*.

**b) Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)**

Kedua indikator pendidikan ini dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan .

b.1) Penghitungan Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) adalah sebagai berikut :

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t} \quad \text{dimana:}$$

$HLS_a^t$  adalah Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

$E_i^t$  adalah Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

$P_i^t$  adalah Jumlah penduduk usia i pada tahun t

$i$  adalah Usia (a,a+1,...+n)

b.2) Penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)

- **Langkah Pertama**, menyeleksi penduduk pada usia 25<sup>th</sup> ke atas.
- **Langkah Kedua**, menghitung lamanya sekolah.
  - Jika partisipasi sekolah yaitu **tidak/belum pernah bersekolah**, maka **lama sekolah = 0**.
  - Jika partisipasi sekolah yaitu **masih bersekolah** atau **tidak bersekolah lagi**, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut.

Keterangan	Lama Sekolah
Masih bersekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

- **Langkah Ketiga**, menghitung rata-rata lama sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

*RLS* : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

*Lama sekolah penduduk<sub>i</sub>*: lama sekolah penduduk ke-*i* di suatu wilayah

*n*: jumlah penduduk ( $i = 1, 2, 3, \dots, n$ )

**Tabel : 2.3. Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir**

<b>Ijazah</b>	<b>Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)</b>
(1)	(2)
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMALB/MA/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

**c) Kemampuan daya beli**

Ukuran pantas daya beli menggunakan variabel *purchasing power parity*, karena secara konseptual jelas lebih lengkap dalam penyeleksian taraf pembangunan manusia,. Ukuran yang digunakan dalam hal ini adalah konsumsi per kapital ril yang telah disesuaikan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data Susenas 2014.

1. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dari Susenas

- **Langkah Pertama**, hitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga.
- **Langkah Kedua**, hitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota.

- **Langkah Ketiga**, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan ( $\bar{Y}_t$ ) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan x 12 / 1000.

2. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dalam Harga Konstan (riil)

- Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{\bar{Y}_t}{IHK(t,2012)} \times 100$$

$Y_t^*$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

$\bar{Y}_t$  = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK(t,2012)$  = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

3. Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP)

- **Langkah Pertama**, menghitung harga rata-rata komoditas terpilih.

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}, \text{Keterangan:}$$

- $P_i$  = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah
- $V_i$  = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah
- $Q_i$  = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah
- Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK.
- **Langkah Kedua**, menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut:

$$\text{ParitasDayaBeli}_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

$p_{ij}$  : harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan

$p_{ik}$  : harga komoditas  $i$  di kab/kota  $j$

$m$  : jumlah komoditas

- **Langkah Ketiga**, menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{ParitasDayaBeli}}$$

$Y_t^{**}$  : Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

$Y_t^*$  : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH

#### III.1 Kondisi Geografis

Kota Pekalongan terletak antara 6 50' 42" - 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" - 109 42' 19" Bujur Timur

Secara administrasi, wilayah Kota Pekalongan mempunyai batas-batas :

- Bagian utara : Laut Jawa
- Bagian Selatan : Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang
- Bagian Barat : Kabupaten Pekalongan
- Bagian Timur : Kabupaten Batang

Kota Pekalongan memiliki ketinggian kurang lebih 1 meter dari permukaan laut. Di wilayah sebelah utara merupakan daerah pantai, sedangkan wilayah bagian tengah merupakan daerah dataran.

Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari tanah sawah seluas 12,38 km<sup>2</sup> (27,36 persen ) dan tanah kering seluas 32,87 km<sup>2</sup> (72,64 persen). Wilayah administrasi Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 47 kelurahan.

#### III.2 Kependudukan

Penduduk merupakan sasaran utama pembangunan manusia, sehingga data kependudukan menjadi sangat vital dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Jumlah penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014 adalah 293.704 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 146.863 jiwa dan perempuan sebanyak 146.841 jiwa. *Sex* rasio sebesar 100,02 menunjukkan perbandingan bahwa penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa maka terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 100 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 6.491 jiwa/Km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,98%. Angka ini menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan penduduk sebesar 0,03% dibandingkan laju pertumbuhan penduduk tahun sebelumnya yang mencapai angka 1,01 %.

Penduduk menurut kelompok umur akan dapat memberikan gambaran tentang kejadian demografis (fertilitas, mortalitas dan migrasi). Hasil pengumpulan data penduduk tahun 2014 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 25,96% atau 76.246 jiwa. Dari penduduk usia muda diatas, terdapat penduduk balita (0-4 tahun) sebesar 8,57% atau 25.182 jiwa dari jumlah penduduk. Sedangkan penduduk pada kelompok lanjut usia (lansia) yaitu penduduk berusia 65 tahun keatas sebesar 4,64% atau 13.629 jiwa. Usia produktif (umur 15-64) penduduk Kota Pekalongan mencapai 69,40% atau sebanyak 203.829 jiwa. Dari keadaan ini dapat diketahui bahwa penduduk Kota Pekalongan dikategorikan sebagai penduduk usia muda.

## BAB IV

### ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk manusia itu sendiri, dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi tiap manusia atau rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. (*United Nation Development Programme-UNDP*).

Peningkatan pembangunan manusia dapat dilakukan melalui pendekatan kondisi kesehatan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk penghasilan dan pendapatan keluarga. Pendidikan dan kualitas individu yang berkaitan dengan tradisi, norma, produktifitas dan perilaku kehidupan, serta peningkatan usaha kesejahteraan lainnya, baik manusia sebagai diri pribadi, keluarga, masyarakat, warga negara, dan himpunan kualitas secara menyeluruh, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun keluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam bab ini dibahas tentang indikator pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan hasil keadaan manusia di Kota Pekalongan. Indikator tersebut diharapkan akan dapat mengetahui sejauh mana keadaan hasil pembangunan sumber daya manusia di Kota Pekalongan selama periode 2010 – 2014.

#### IV.1 Indikator Pendidikan

Dalam perkembangan negara-negara di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa, tidak semata-mata bergantung pada keunggulan sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya, melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Oleh karena itu dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia yang unggul, penyelenggaraan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan efisien, merupakan upaya yang strategis dan mendasar.

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan nasional, pemerintah telah menyusun serangkaian kebijakan, salah satu diantaranya adalah pelaksanaan “Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun“. Dengan kebijakan/program tersebut diharapkan kualitas SDM dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberi nilai lebih berkualitas terhadap pertumbuhan ekonomi.

Upaya peningkatan pembangunan pendidikan memerlukan data yang akurat, agar diketahui berbagai macam keadaan yang mendasari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan peningkatan pembangunan pendidikan. Data yang dimaksud merupakan indikator pendidikan, karena berfungsi memberikan indikasi atau petunjuk tentang berbagai macam dan jenis keadaan yang dimaksud.

Kaitannya dengan upaya peningkatan pembangunan manusia melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan indikator yang dapat digunakan untuk memantau keberhasilan antara lain Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lamanya Sekolah, Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan, Fasilitas Pendidikan, Rasio Murid-Guru dan Rasio murid per sekolah.

#### **IV.1.1 Harapan Lama Sekolah**

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka harapan lama sekolah, yang bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren yang datanya bersumber dari Direktorat Pendidikan Islam.

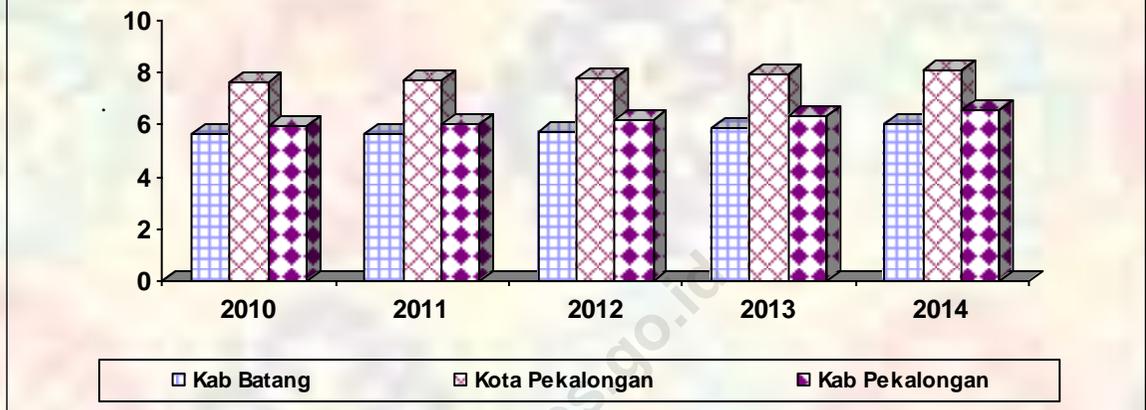
Tabel 4.1 Harapan Lama Sekolah (HLS)  
Di Kota Pekalongan, Kab.Pekalongan, Kab.Batang dan Provinsi Jawa Tengah

Daerah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
I. Kab. Batang	10,00	10,32	10,43	10,45	10,65
II. Kota Pekalongan	10,96	11,05	11,13	11,56	11,93
III. Kab. Pekalongan	10,50	10,99	11,17	11,55	11,93
IV. Jawa Tengah	11,09	11,18	11,39	11,89	12,17

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan periode tahun 2010 – 2014 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8,85 persen. Pada tahun 2010, angka Harapan Lama Sekolah sudah mencapai 10,96 tahun, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,93 tahun atau tiap tahunnya angka Harapan Lama Sekolah selama periode 2010 – 2014 meningkat 1,77 persen/tahun.

Di tahun 2014, angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan mencapai 11,93 tahun artinya penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih berstatus sekolah selama minimal 11 tahun atau minimal di umur 18 tahun masih sekolah. Dengan demikian tingkat pendidikan di Kota Pekalongan di tahun 2014 minimal harus SLTP atau yang sederajat.

**Grafik 4. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kab Batang, Kab Pekalongan dan Kota Pekalongan**



#### IV.1.2 Rata-rata Lama Sekolah

Selain angka harapan lama sekolah, komponen IPM berupa tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah, dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kota Pekalongan.

Berdasarkan data dari Susenas tahun 2014, angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,12 tahun, angka ini berarti bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kota Pekalongan dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP. Angka ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2013 lalu yaitu sebesar 1,98 persen. Namun demikian untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun masih butuh waktu yang relatif lama sehingga diperlukan upaya lebih keras lagi dari pemerintah daerah Kota Pekalongan untuk mencapai target tersebut. Upaya yang telah ditempuh seperti antara lain agar pendidikan warga Kota Pekalongan mulai pada usia dini (PAUD) diwujudkan pada setiap wilayah RW, juga kewajiban tiap sekolah menerima murid yang berasal dari warga yang tidak mampu (akan dibiayai sepenuhnya oleh Pemkot Pekalongan), akan dapat mendorong angka rata-rata lama sekolah ini. Hal yang juga perlu dilakukan adalah

membuat perangkat atau aturan dan petunjuk teknisnya, untuk mendorong setiap warga Kota Pekalongan berusia sekolah untuk bersekolah, minimal menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Tabel 4.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)  
Di Kota Pekalongan, Kab.Pekalongan, Kab.Batang dan Provinsi Jawa Tengah

Daerah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
I. Kab. Batang	5,62	5,66	5,70	5,88	6,00
II. Kota Pekalongan	7,60	7,72	7,80	7,96	8,12
III. Kab. Pekalongan	5,93	6,04	6,15	6,37	6,53
IV. Jawa Tengah	6,71	6,74	6,77	6,80	6,93

#### IV.1.3 Tingkat Partisipasi Sekolah

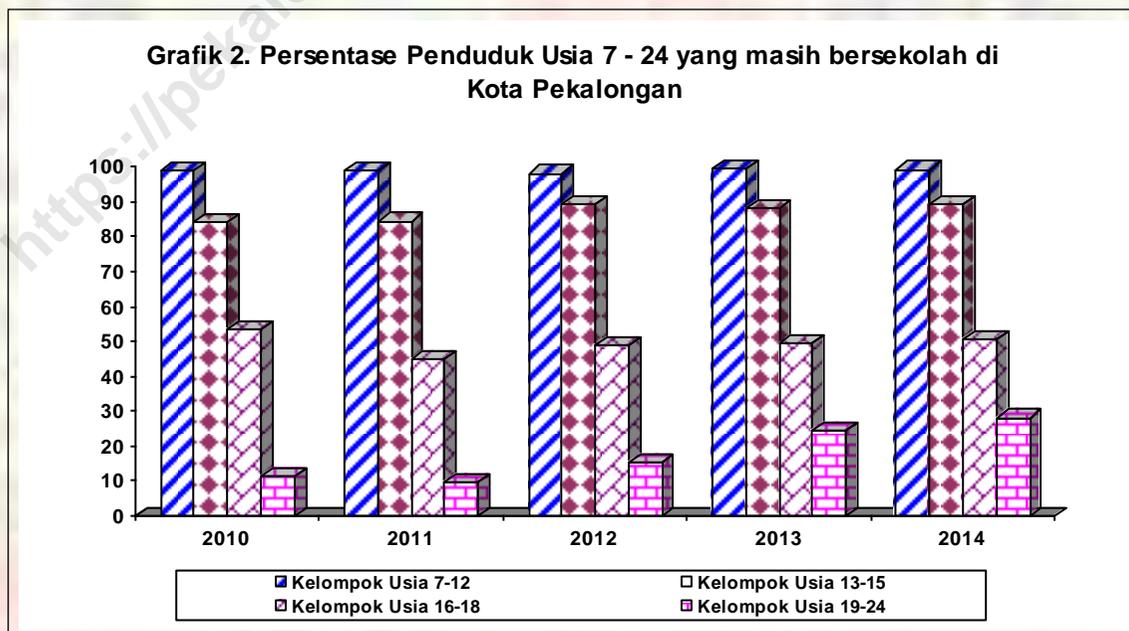
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Angka partisipasi sekolah diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya penduduk yang masih bersekolah pada kelompok usia sekolah tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk yang seharusnya masih sekolah pada kelompok usia yang sama.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Yang Berstatus Masih Sekolah  
Di Kota Pekalongan

Kelompok Usia	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 – 12	98,98	98,87	98,11	99,65	99,24
13 – 15	84,13	84,36	89,15	88,17	89,33
16 – 18	53,54	44,85	48,84	49,45	50,65
19 – 24	11,45	9,71	15,26	24,42	28,13

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan tahun 2014

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan pada tahun 2014 untuk tingkat sekolah dasar, ada sebanyak 99,24 persen penduduk usia 7 – 12 tahun (usia sekolah dasar) telah bersekolah, angka ini berkurang sebesar 0,41 persen bila dibandingkan tahun 2013 yang sudah mencapai 99,65 persen. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu tingkat SLTP, tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 angka partisipasi sekolah usia 13 – 15 tahun telah mencapai 88,17 persen, dan pada tahun 2014 naik menjadi 89,33 persen. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah atas (usia 16 – 18 tahun), yakni menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2013 angka partisipasi sekolah untuk usia 16 – 18 tahun mencapai sebesar 49,45 persen dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 50,65 persen atau mengalami peningkatan sebesar 2,43 persen. Untuk tingkat pendidikan tinggi, di tahun 2014 penduduk kota Pekalongan yang masih kuliah sudah mencapai mencapai 28,13 persen. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan angka pada akhir tahun 2013 yang hanya mencapai 24,42 persen.



#### IV.1.4 Fasilitas Pendidikan

Keberadaan serta kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan berperan penting dalam peningkatan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Salah satu sarana yang penting adalah sekolah yang merupakan wahana penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal. Fasilitas pendidikan yang memadai sangat diperlukan dengan mendukung visi dan misi pembangunan pendidikan, yaitu memperluas kesempatan belajar bagi semua penduduk, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keterampilan untuk kehidupan, serta sekaligus terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah perlu menyediakan sarana belajar antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah baru, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan penambahan jumlah pendidik yang berkualitas.

Pada tabel 4.3 menunjukkan perkembangan jumlah fasilitas pendidikan di Kota Pekalongan periode 2013 – 2014. Jumlah fasilitas pendidikan di Kota Pekalongan pada Tahun 2014 untuk sekolah SD/MI sebanyak 242, Sekolah SLTP/ sederajat 36 sekolah dan sekolah SLTA/ sederajat 28.

Jumlah murid SD/MI tahun 2014 bertambah 22,61 persen dibanding tahun 2013, demikian juga dengan jumlah guru yang bertambah sebanyak 39,92 persen untuk periode yang sama. Sedangkan Rasio antara murid-guru maupun murid-sekolah, masing-masing mengalami pertambahan -12,7 dan -25,01persen.

Jumlah murid SLTP/Sederajat tahun 2014 bertambah 5,62 persen dibanding tahun 2013 sedangkan jumlah guru mengalami pengurangan jumlah sebanyak 0,31 persen untuk periode yang sama. Sedangkan Rasio antara murid-guru maupun murid-sekolah, masing-masing mengalami pertambahan 5,94 dan 8,55 persen.

Jumlah murid SMU/Sederajat tahun 2014 bertambah 12,83 persen dibanding tahun 2013 demikian juga dengan jumlah guru yang mengalami penambahan personil sebanyak 13,27 persen untuk periode yang sama. Sedangkan Rasio antara murid-guru maupun murid-sekolah, masing-masing adalah -0,40 dan 20,89 persen.

Tabel 4.3 Banyaknya Fasilitas Pendidikan dan Rasio  
Antara Murid Terhadap Guru dan Sekolah  
Di Kota Pekalongan

Tingkat Pendidikan	2013	2014	Perubahan ( % )
<b>1. SD/MI</b>			
- Jumlah Sekolah	148	242	63,51
- Jumlah Murid	33.029	40.498	22,61
- Jumlah Guru	1.974	2.762	39,92
- Rasio Murid/Guru	16,73	14,66	-12,37
- Rasio Murid/Sekolah	223,17	167,35	-25,01
<b>2. SLTP Sederajat</b>			
- Jumlah Sekolah	37	36	-2,70
- Jumlah Murid	15.645	16.524	5,62
- Jumlah Guru	968	965	-0,31
- Rasio Murid/Guru	16,16	17,12	5,94
- Rasio Murid/Sekolah	422,84	459	8,55
<b>3. SMU Sederajat</b>			
- Jumlah Sekolah	30	28	-6,67
- Jumlah Murid	13.032	14.704	12,83
- Jumlah Guru	1.040	1.178	13,27
- Rasio Murid/Guru	12,53	12,48	-0,40
- Rasio Murid/Sekolah	434,4	525,14	20,89

Kemudian dilihat dari angka rasio antara murid dan guru pada tingkat SD pada tahun 2013 tercatat sebesar 16,73. Hal ini berarti tiap 1 orang guru mengajar 16 orang murid, dibanding tahun 2012 angka rasio tersebut naik meskipun tidak signifikan. Dengan demikian berarti beban mengajar murid oleh setiap guru meningkat. Pada tingkat SLTP angka rasio antara murid dan guru mengalami peningkatan sebesar 7,45 persen dibanding tahun 2012, peningkatan ini menunjukkan bahwa beban setiap guru mengajar mengalami peningkatan pula, menjadi 16 orang murid dari sebelumnya hanya 15 murid di tahun 2012. Hal ini mengindikasikan adanya penambahan jumlah murid yang diiringi dengan berkurangnya jumlah guru yang proporsional. Pada pendidikan tingkat SLTA,

rasio antara murid dan guru pada tingkat SLTA sederajat meningkat dari 12,10 pada tahun 2012 menjadi 12,53 pada tahun 2013. Meskipun mengalami peningkatan rasio antara murid dan guru, namun beban setiap guru SLTA untuk mengajar adalah relatif tetap, yakni 12 murid.

## **IV.2 Indikator Kesehatan**

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya Peningkatan pembangunan manusia. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk secara fisik, dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Indikator utama yang dipakai untuk melihat derajat kesehatan adalah angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Selain derajat kesehatan, aspek penting yang lain dari kualitas kesehatan penduduk adalah status kesehatan, yang antara lain dapat diukur dari angka kesakitan. Di samping itu, dalam sub bab ini dibahas masalah penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.

### **IV.2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat**

Derajat kesehatan penduduk Kota Pekalongan pada periode 2010 – 2014 menunjukkan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup.

Angka Harapan Hidup di Kota Pekalongan pada periode 2010 – 2014, mengalami peningkatan dari 73,91 tahun menjadi 74,09 tahun, ini artinya bahwa, usia hidup penduduk Kota Pekalongan bertambah selama 0,18 tahun atau bertambah 0,24 persen. Secara tidak langsung, hal ini merupakan petunjuk bahwa kualitas kesehatan penduduk Kota Pekalongan telah meningkat menjadi lebih baik. Semakin tinggi angka harapan hidup, berarti semakin tinggi pula kualitas hidup penduduk wilayah tersebut.

Sedangkan untuk angka kematian bayi di Kota Pekalongan pada tahun 2014 mencapai 10,14 setiap 1000 kelahiran hidup, angka ini menunjukkan adanya peningkatan secara kualitas karena adanya penurunan dalam jumlah kematian bayi, dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 14,19 setiap 1000 kelahiran hidup.

Tabel 4.4 Angka Derajat Kesehatan Kota Pekalongan

Derajat Kesehatan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
- Angka Harapan Hidup	73,91	73,96	74,01	74,06	74,09
- Angka Kematian Bayi	9,31	9,23	11,80	14,19	10,14



#### IV.2.2 Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Pada Tabel 4.5 menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan pada tahun 2013 – 2014. Pada tahun 2014, jumlah dokter sebanyak 137 orang, Rumah Sakit 9 unit, Puskesmas dan Pustu sebanyak 55 unit. Jika melihat keadaan pada tahun 2013, maka jumlah dokter jauh berkurang sebanyak 126 orang, jumlah Rumah Sakit bertambah 1 unit demikian juga dengan jumlah Puskesmas dan Pustu yang bertambah 14 unit.

Rasio jumlah dokter terhadap penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2014 mencapai angka 1 dokter berbanding 2.143 jiwa. Hal ini berarti bahwa 1 dokter harus melayani sekitar 2.143 penduduk. Angka ini jika kita bandingkan dengan tahun 2013, yang mencapai sekitar 1 dokter berbanding 1.105 penduduk, mengalami peningkatan, karena jumlah penduduk yang dilayani oleh seorang dokter menjadi bertambah sehingga harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lebih baik menjadi sedikit lebih berat.

Tabel 4.5 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan  
Di Kota Pekalongan

Uraian	2013	2014	Perubahan (Point)
Rumah Sakit	8	9	12,50
Dokter	263	137	-47,91
Pukesmas dan Pustu	41	55	34,15
Rasio Dokter/Penduduk	1.106	2.143	93,76

### IV.2.3 Indikator Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam pembangunan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, maka akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Oleh karenanya, salah satu sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai, sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja.

#### IV.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perkembangan ketenakerjaan di Kota Pekalongan, secara selintas dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan yang disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kerja  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas  
Di Kota Pekalongan

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Angkatan Kerja					
- Bekerja	67,24	65,28	64,32	63,12	65,56
- Mencari Kerja	5,06	5,13	5,17	3,52	3,76
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	72,30	70,41	69,49	66,64	69,32
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,00	7,29	7,44	5,28	5,42

TPAK Kota Pekalongan pada tahun 2014 sebesar 69,32 persen lebih tinggi dibanding di tahun 2013 yang telah mencapai 66,64 persen. Angka TPAK sebesar 69,32 persen berarti setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 69 orang sebagai angkatan kerja (yang bekerja dan mencari pekerjaan) dan sisanya 31 orang sebagai bukan angkatan kerja (yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, pelatihan, dsb). Hal ini dapat juga mengindikasikan adanya penambahan jumlah penduduk yang bersekolah atau mengurus rumahtangga, sebanyak 31 orang, dibandingkan dengan tahun 2013 lalu ada 34 orang yang bukan angkatan kerja dari 100 orang penduduk berusia kerja.

#### IV.2.5 Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Banyaknya penduduk yang berada dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja

yang tidak terserap merupakan masalah, sebab berarti mereka terpaksa menganggur. Tingkat kesempatan kerja diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) pada tahun 2014 di Kota Pekalongan sebesar 94,58 persen. TKK merupakan kebalikan dari angka tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka Kota Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir berada di kisaran 7 persen. Tingkat kesempatan kerja mencapai 94,58 persen mengandung maksud bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 94 orang yang bekerja sedangkan sisanya 6 orang menganggur.

### **IV.3 Standar Hidup Layak Penduduk**

Standar hidup layak merupakan komponen ketiga selain dua komponen penghitungan IPM diatas, yang juga diakui secara luas sebagai unsur dasar pembangunan manusia. Berbeda dengan UNDP yang menggunakan GDP riil per kapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak, BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita ril yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity PPP*).

- Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.
- Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100
- Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Standar hidup layak yang menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang telah disesuaikan untuk Kota Pekalongan pada tahun 2014 sebesar Rp 11.006.000,-. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 yang besarnya telah mencapai Rp 10.922.000,- mengalami kenaikan sebesar 0,77 persen.

Kenaikan angka pengeluaran per kapita disesuaikan tahun 2014 yang mencapai 0,77 persen tidak sebanding dengan kenaikan inflasi yang terjadi antara tahun 2013 dan

tahun 2014. Inflasi tahun 2014 sebesar 7,82 persen sedang inflasi tahun 2013 sebesar 7,40 persen sehingga terjadi kenaikan inflasi sebesar 5,68 persen.

Tabel 4.2 Rata-rata Pengeluaran/Kapita Disesuaikan  
Di Kota Pekalongan, Kab.Pekalongan, Kab.Batang dan Provinsi Jawa Tengah

Daerah	Tahun				
	2010 (000 Rp)	2011 (000 Rp.)	2012 (000 Rp.)	2013 (000 Rp.)	2014 (000 Rp.)
I. Kab. Batang	7.724	7.610	7.821	7.967	8.012
II. Kota Pekalongan	10.224	10.560	10.756	10.922	11.006
III. Kab. Pekalongan	8.403	8.576	8.752	8.884	8.938
IV. Jawa Tengah	8.992	9.296	9.497	9.618	9.640

#### IV.3.1 Status Pembangunan Manusia

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah berusaha dengan berbagai upaya dalam meningkatkan kondisi perekonomiannya, agar dapat lebih baik lagi dari pertumbuhan di masa-masa yang lalu.

Tahapan-tahapan pemulihan kondisi perekonomian telah dilakukan dan hasilnya pun mulai nampak. Kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia, dapat dilihat melalui besarnya IPM.

Dari hasil perhitungan IPM yang menggunakan 3 komponen indikator dan variabel pembangunan manusia, yaitu indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maka diperoleh angka dan posisi IPM Kota Pekalongan yang tercantum pada tabel di bawah ini

Tabel 4.7 Angka IPM Kota Pekalongan  
Tahun 2010 – 2014

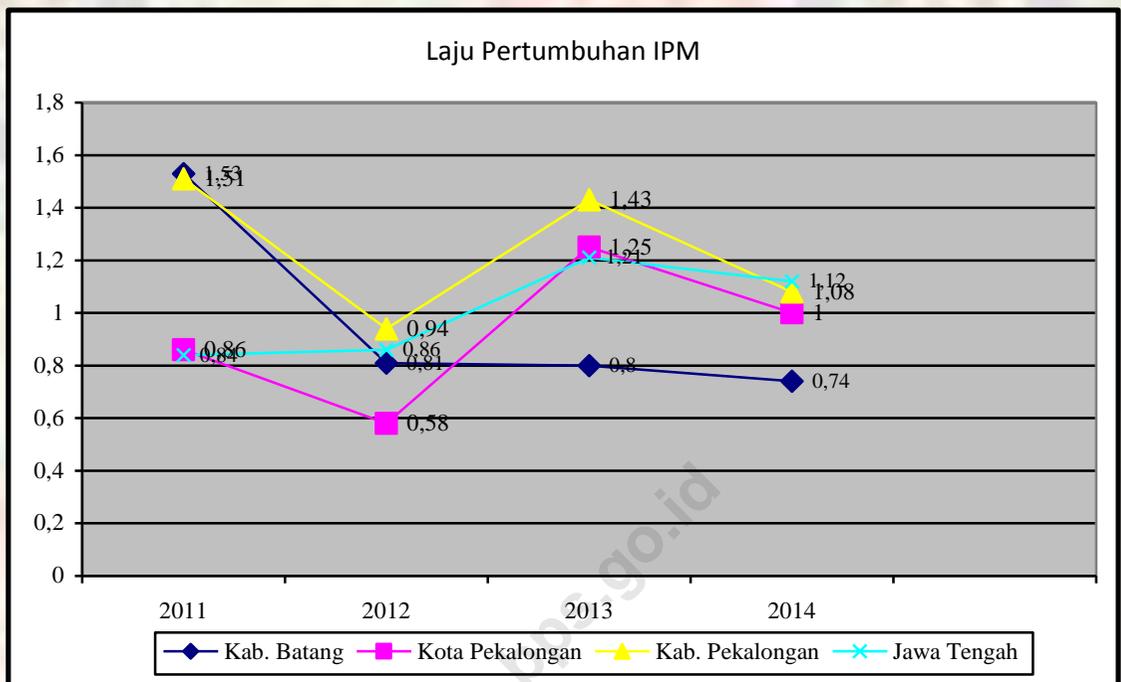
Tahun	Angka IPM	Status Kategori	Peringkat Propinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	68,95	Menengah	11
2011	69,54	Menengah	11
2012	69,95	Menengah	11
2013	70,82	Tinggi	11
2014	71,53	Tinggi	11

Pada tabel 4.7 memperlihatkan bahwa, peringkat IPM di Kota Pekalongan pada tahun 2014 berada pada posisi ke 11 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Posisi tersebut tetap selama periode 2010 – 2014.

Angka IPM Kota Pekalongan periode 2010 – 2014 menunjukkan adanya peningkatan dari 68,95 pada tahun 2010 menjadi 71,53 pada tahun 2014. Status pembangunan manusia menurut UNDP, angka IPM Kota Pekalongan periode 2010 – 2012 masuk kategori menengah ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ) sedangkan periode 2013 - 2014 masuk kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Secara kualitas, pembangunan manusia di Kota Pekalongan di tahun 2014 masuk dalam kategori tinggi.

#### IV.3.2 Laju Pertumbuhan Pembangunan Manusia

Laju pertumbuhan pembangunan manusia dalam kurun waktu tertentu dapat diukur dengan membandingkan antara pencapaian yang telah diperoleh pada tahun  $t$  dengan capaian pada tahun sebelumnya ( $t-1$ ) menuju titik ideal ( $\text{IPM} = 100$ ).



Laju pertumbuhan pembangunan manusia selama periode 2010 – 2014 di Kota Pekalongan cenderung meningkat yang fluktuatif. Hal ini memberikan gambaran bahwa selama periode tahun 2010 – 2014 pembangunan manusia di Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan. Adapun penyebabnya adalah adanya peningkatan daya beli masyarakat, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah meningkat serta peningkatan angka harapan hidup di setiap tahunnya selama periode 2010 – 2014.

Pada periode tahun 2010 – 2014, akselerasi percepatan pembangunan manusia Kota Pekalongan mencapai 3,74 persen nilainya sedikit dibawah dari akselerasi percepatan pembangunan manusia Jawa Tengah yang sudah mencapai 4,08 persen.

Tabel 4.8 Pertumbuhan Angka IPM Kota Pekalongan

Dan Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014

Pertumbuhan	Tahun			
	2010 – 2011	2011 – 2012	2012 – 2013	2013 – 2014
- Kota Pekalongan	0,86	0,58	1,25	1,00
- Jawa Tengah	0,84	0,86	1,21	1,12

## BAB V. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai indeks pembangunan manusia di Kota Pekalongan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar hampir 1,00 persen dari 70,82 pada tahun 2013 menjadi 71,53 di tahun 2014 dan menduduki posisi peringkat ke-11 dari 33 Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah.
- b. Komponen IPM di bidang kesehatan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya angka harapan hidup selama periode 2010 – 2014 yaitu dari 73,91 tahun pada tahun 2010 menjadi 74,09 tahun pada tahun 2014 atau mengalami perpanjangan umur sebesar 0,18 tahun.
- c. Komponen IPM di bidang pendidikan selama priode 2010 – 2014 mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2010 sebesar 10,96 tahun meningkat menjadi 11,93 tahun pada tahun 2014 dan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2010 sebesar 7,60 tahun meningkat menjadi 8,12 tahun pada tahun 2014.
- d. Komponen IPM di bidang ekonomi melalui pendekatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, selama periode 2010 – 2014 memperlihatkan adanya tren peningkatan tiap tahunnya yakni dari Rp 10.224.000 menjadi Rp 11.006.000.

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014 Menurut Kelompok Umur .....	59
Tabel 2 Persentase Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014 Menurut Kelompok Usia Sekolah .....	60
Tabel 3 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2014 .....	61
Tabel 4 Jumlah Kelas Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2014 .....	62
Tabel 5 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2014 .....	63
Tabel 6 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2014 .....	64

Tabel : 1 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014  
Menurut Kelompok Umur

<b>Golongan Umur</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	13.091	12.091	25.182
5 – 9	12.970	12.399	25.369
10 – 14	12.997	12.698	25.695
15 – 19	13.841	13.099	26.940
20 – 24	14.536	12.991	27.527
25 – 29	12.808	12.056	24.864
30 – 34	11.546	11.784	23.330
35 – 39	11.064	11.338	22.402
40 – 44	10.066	10.629	20.695
45 – 49	9.304	10.017	19.321
50 – 54	8.407	8.783	17.190
55 – 59	6.694	6.649	13.343
60 – 64	4.057	4.160	8.217
65 – 69	2.368	2.938	5.306
70 – 74	1.507	2.166	3.673
75 +	1.607	3.043	4.650
<b>Jumlah</b>	<b>146.863</b>	<b>146.841</b>	<b>293.704</b>

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015

Tabel : 2 Persentase Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014  
Menurut Kelompok Usia Sekolah

<b>Kelompok Usia Sekolah</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7 – 12</b>	98,98	98,87	98,11	99,65	99,24
<b>13 – 15</b>	84,13	84,36	89,15	88,17	89,33
<b>16 – 18</b>	53,54	44,85	48,84	49,45	50,65
<b>19 – 24</b>	11,45	9,71	15,26	24,42	28,13

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan Tahun 2014

Tabel : 3 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan  
Di Kota Pekalongan Tahun 2014

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	70	71	74	74	77
SD Negeri dan Swasta	124	125	125	101	99
MI Negeri dan Swasta	46	47	47	47	47
SMP Negeri dan Swasta	27	27	27	28	27
MTs Negeri dan Swasta	7	9	9	9	9
SMA Negeri dan Swasta	11	11	11	11	9
MA Negeri dan Swasta	6	6	6	6	6
SMK Negeri dan Swasta	11	11	13	13	13

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015

Tabel : 4 Jumlah Kelas Menurut Tingkat Pendidikan  
Di Kota Pekalongan Tahun 2014

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	207	212	233	237	254
SD Negeri dan Swasta	871	866	872	827	809
SMP Negeri dan Swasta	363	368	368	387	382
SMA Negeri dan Swasta	174	174	141	135	128
SMK Negeri dan Swasta	165	170	184	227	210

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015

Tabel : 5 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan  
Di Kota Pekalongan Tahun 2014

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Taman Kanak-kanak	2.103	2.118	2.292	4.967	2.562
SD Negeri dan Swasta	11.877	11.699	11.451	23.437	22.636
MI Negeri dan Swasta	9.532	9.554	9.697	9.592	9.975
SMP Negeri dan Swasta	6.255	6.066	6.019	12.151	12.279
MTs Negeri dan Swasta	2.740	2.984	3.440	3.494	3.747
SMA Negeri dan Swasta	2.052	2.066	2.081	3.521	3.677
MA Negeri dan Swasta	2.432	2.512	3.118	2.526	2.384
SMK Negeri dan Swasta	3.112	3.247	3.365	6.985	7.184

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015

Tabel : 6 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan  
Di Kota Pekalongan Tahun 2014

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	418	436	474	474	421
SD Negeri dan Swasta	995	999	986	1.429	1.302
MI Negeri dan Swasta	497	536	524	545	537
SMP Negeri dan Swasta	435	435	446	744	737
MTs Negeri dan Swasta	150	205	227	224	228
SMA Negeri dan Swasta	154	153	155	318	274
MA Negeri dan Swasta	191	193	266	191	196
SMK Negeri dan Swasta	485	499	531	531	274

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015



# Data Mencerdaskan Bangsa

**Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan**

Jl. Singosari, Podosugih, Pekalongan. 51111.  
Telp. (0285) 423504 Fax. (0285) 4420122  
<http://pekalongankota.bps.go.id>  
Email: [bps3375@bps.go.id](mailto:bps3375@bps.go.id)